

## WACANA PENGUBURAN SECARA BERDIRI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Efrial Susanto,<sup>1</sup>  
Suwarjin,<sup>2</sup> Iim Fahimah,<sup>3</sup>

**Abstract:** To overcome the burial land crisis in big cities, one solution is to change the procedure for placing the body in the grave during the funeral procession, which is to put it standing up, not lying down as usual. What are the reasons for the discourse on standing burials in the cemeteries of big cities? How does Islamic law review standing burials? To find out what funeral problems that occur in big cities. To find out how Islamic law reviews stand for burial. This type of research is in the form of library research, namely research using books and literature as the main object. This research was designed in the form of library research (library research). The results of the research conclude that the cause of standing burial discourse is population development, and a high mortality rate which is not accompanied by the availability of burial land and funeral processions that are usually carried out making the burial ground increasingly depleted. Standing burial may be carried out when the condition of the burial is already in a difficult and emergency situation, based on the proposition of bidharurah istihsan, the ad-Dhararu Yuzalu fihiyyah principle (Kemudharatan is removed) and the ad-Dharurat law of fihiyyah Tubihu al-Mahzhurat (emergency allows prohibition).

**Keywords:** Standing Burial, Islamic Law

**Abstrak:** Untuk mengatasi krisis lahan pemakaman di kota-kota besar maka salah satu solusinya adalah dengan merubah tatacara peletakkan jenazah di dalam kubur pada prosesi pemakaman yaitu di letakkan secara berdiri, tidak di baringkan seperti biasanya. Apa yang menjadi sebab adanya wacana penguburan secara berdiri di pemakaman kota-kota besar?. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap penguburan secara berdiri?. Untuk mengetahui apa permasalahan-permasalahan pemakaman yang terjadi di kota-kota besar. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap penguburan secara berdiri. Jenis penelitian yang dilakukan berupa penelitian library research yaitu penelitian yang menggunakan buku dan literatur sebagai objek utama. Penelitian ini didesain dalam bentuk penelitian kepustakaan (library research). Adapun hasil penelitian menyimpulkan Penyebab adanya wacana penguburan secara berdiri adalah Perkembangan penduduk, dan tingkat kematian yang tinggi yang tidak di barengi dengan ketersediaan lahan pemakaman serta prosesi pemakaman yang biasa dilakukan membuat tanah makam semakin hari semakin menipis. Penguburan secara berdiri boleh dilakukan bila kondisi pemakaman tersebut sudah dalam keadaan sulit dan darurat, berdasarkan dalil istihsan bidharurah, kaedah fihiyyah Ad-Dhararu Yuzalu (Kemudharatan dihilangkan) dan kaedah fihiyyah Ad-Dharurat Tubihu al-Mahzhurat (darurat itu membolehkan larangan).

**Kata kunci :** Penguburan Berdiri, Hukum Islam

### Pendahuluan

Kematian adalah sesuatu yang pasti akan datang. Meskipun seorang berupaya untuk lari darinya, niscaya kematian akan datang menghampirinya, firman Allah SWT.

Artinya :

“Katakanlah, ”Sesungguhnya kematian yang kalian lari darinya, sesungguhnya kematian itu akan menemui kalian, kemudian kalian akan dikembalikan kepada (Allah), yang mengetahui yang ghaib dan yang nyata. Lalu Dia akan beritakan kepada kalian tentang apa-apa yang telah kalian kerjakan”.<sup>4</sup>

Mengingat mati adalah sebuah kewajiban bagi setiap muslim agar lebih giat beribadah dan tidak terbuai dengan segala kehidupan dunia dari dua sisinya, senang dan sedih, kaya dan miskin, bahagia dan derita. Oleh karena itu Rasulullah memerintahkan untuk banyak mengingat kematian, agar seorang muslim bergegas untuk mempersiapkan bekalnya. Diriwayat-

kan dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah bersabda;

Artinya :

“Perbanyaklah mengingat pemutus (segala) kenikmatan, (yaitu) kematian.”(HR. Tirmidzi).<sup>5</sup>

Ketika seorang muslim meninggal dunia, maka muslim lainnya berkewajiban untuk mengurus jenazahnya, dimulai dari hal-hal yang dilakukan ketika ada yang meninggal, memandikan jenazah, mengkafani, menshalatkan dan memakamkannya. Sebagaimana yang di isyaratkan oleh Rasulullah di dalam salah satu hadisnya yang diriwayatkan dari Abu Hurairah, sesungguhnya Rasulullah bersabda;

Artinya :

“Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda: “Hak muslim kepada muslim yang lain ada enam.” Beliau shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, “Apabila engkau bertemu, ucapkanlah salam kepadanya; Apabila engkau diundang, penuhilah undangannya;

Apabila engkau dimintai nasihat, berilah nasihat kepadanya; Apabila dia bersin lalu dia memuji Allah (mengucapkan 'alhamdulillah'), doakanlah dia (dengan mengucapkan 'yarhamukallah'); Apabila dia sakit jenguklah dia; dan Apabila dia meninggal dunia, iringilah jenazahnya (sampai ke pemakaman)."(HR. Muslim).<sup>6</sup>

Pemakaman merupakan bagian yang penting dari proses penyelenggaraan jenazah, semua ulama' sepakat bahwa pemakaman adalah fadhu kifayah yang apabila sudah ada sebagian umat muslim yang melaksanakannya maka sebagian lainnya terbebas dari kewajiban itu.<sup>7</sup> Setelah semua persiapan di lakukan mulai dari mentalqinkan, memandikan, mengkafani dan menshalatkan, maka jenazah akan di hantarkan menuju tempat peristirahatan terakhirnya di dalam kubur. Ini merupakan penghormatan dan cara kita memuliakan seorang muslim baik ketika hidup maupun setelah meninggal. Aturan-aturan Islam perihal penguburan ini menunjukkan bahwa Islam sangat memuliakan umat manusia. Tidak hanya ketika masa hidupnya saja, setelah meninggal pun jenazah mesti diperlakukan dengan baik.<sup>8</sup> Sebagaimana yang dijelaskan didalam kitab suci al-quran.<sup>9</sup>

Artinya :

*"Dan sungguh telah Kami muliakan anak keturunan Adam."*

Artinya :

*"Bukankah Kami menjadikan bumi (tempat) berkumpul orang-orang hidup dan orang-orang mati".*

Artinya :

*"Kemudian Dia mematikannya dan memasukkannya ke dalam kubur".*

Kepadatan penduduk akan berdampak pada peningkatan kebutuhan lahan yang menyebabkan semakin sempitnya lahan untuk fasilitas umum, salah satunya yaitu lahan pemakaman yang saat ini menjadi permasalahan terutama di kota-kota besar. Meningkatnya jumlah kematian menyebabkan permasalahan penyediaan lahan pemakaman bagi penduduk yang meninggal karena lahan pemakaman lambat laun akan penuh jika tidak diimbangi dengan penyediaannya. Disamping itu juga adanya kebiasaan masyarakat Indonesia yang menembok kuburan secara berlebihan yang menjadi salah satu

faktor terjadinya penyempitan lahan makam, padahal sunnahnya adalah cukup dengan memberikan tanda diatas kuburan pada bagian kepala dan kaki.

Dari beberapa kondisi diatas, maka dapat di fahami bahwa adanya kebutuhan yang sangat besar untuk mengatasi krisis lahan pemakaman di kota-kota besar tersebut. Salah satu solusinya adalah dengan merubah tatacara peletakkan jenazah di dalam kubur pada prosesi pemakaman yaitu di letakkan secara berdiri, tidak di baringkan seperti biasanya. Sehingga bisa menghemat kapasitas pemakaman lahan yang di gunakan.

Maka adanya wacana untuk memakamkan jenazah di dalam kubur dengan posisi berdiri hanya membutuhkan tanah satu petak makam yang berbentuk persegi dengan total lahan yang di gunakan 2,5 meter persegi dapat menghemat penggunaan lahan pemakaman. Rinciannya, 1,5 meter x 1,5 meter (2,25 meter persegi) untuk satu petak makam termasuk di dalamnya jarak antar makam dan sisanya untuk sarana prasarana seperti jalan di sebelahnya. Jika dalam sehari ada 100 jenazah yang disemayamkan di Jakarta, maka total lahan yang di gunakan dalam setahun atau 365 hari yakni 91.250 meter persegi atau 9,125 hektare. Sehingga kapasitas lahan Tempat Pemakaman Umum dapat menampung jumlah jenazah yang lebih banyak dan dapat menghemat penggunaan lahan makam di bandingkan dengan penguburan secara biasanya yang memakai lahan dalam setahun yakni 20,075 hektare.

Didalam Alqur'an memang tidak di sebutkan secara langsung adanya kewajiban untuk meletakkan jenazah di dalam kubur pada posisi miring menghadap kearah kiblat, sehingga para ulama fikih pun berbeda pendapat tentang hukumnya, Menurut mazhab Maliki dan Hanafi, sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Wahbah Az-Zuhayli, hukum menghadapkan jenazah ke arah kiblat di dalam liang lahad adalah sunnah. Ini berbeda dengan mazhab Hanbali yang mewajibkannya sebagaimana umumnya ulama mazhab Syafi'i. Semua itu berdasarkan sabda Rasulullah SAW:

Artinya :

*"Dari Umair bin qatadah, bahwasannya nabi Muhammad SAW berkata tentang masjidil haram "(Ka'bah adalah) kiblat kalian, kalian dalam kondisi hidup dan mati," (HR Abu Dawud dan Al-Hakim yang mengatakan, "(Hadits ini) shahih sanadnya,")".<sup>10</sup>*

Penguburan secara berdiri dapat menjadi solusi untuk menekan lajunya krisis lahan pemakaman itu, disamping itu juga pencarian dan pembebasan lahan pemakaman di tempat itu sangat susah dan memakan waktu yang lama sedangkan solusi dari penguburan ini sangat mendesak dan dibutuhkan oleh orang ban-

<sup>6</sup>Q.S. Surah al-Jumu'ah/62: 8

<sup>7</sup>Yahya Ibnu Syarf an-Nawawi, Riyadhusshalihin min kalamain sayyidil mursalin, ( Kairo: Maktabah as-Saffah, 2004), h. 255

<sup>8</sup>Yahya Ibnu Syarf an-Nawawi, Riyadhusshalihin...h. 256

yak. Berdasarkan latar belakang di atas maka peneliti akan mengangkat judul penelitian yaitu: “Wacana Penguburan Secara Berdiri Perspektif Hukum Islam”.

### Rumusan Masalah

1. Apa yang menjadi sebab adanya wacana penguburan secara berdiri di pemakaman kota-kota besar?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap penguburan secara berdiri?

### Tujuan Penulisan

1. Untuk mengetahui apa permasalahan-permasalahan pemakaman yang terjadi di kota-kota besar.
2. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap penguburan secara berdiri.

### Metode Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan berupa penelitian library research yaitu penelitian yang menggunakan buku dan literatur sebagai objek utama. Pendekatan ini menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian ini dilakukan untuk memperoleh gambaran mengenai tinjauan hukum Islam terhadap penguburan secara berdiri. Penelitian ini didesain dalam bentuk penelitian kepustakaan (library research). Penelitian ini berdasarkan studi kepustakaan, sumber bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber bahan primer dan sumber bahan sekunder. Sumber data primer merupakan sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data, sedangkan sumber data sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data.<sup>11</sup>

### Pembahasan

#### A. Penyebab adanya wacana penguburan secara berdiri

Wacana penguburan secara berdiri timbul di latarbelakangi oleh adanya kemungkinan penyempitan lahan yang di sebabkan tingginya angka pertumbuhan penduduk yang tidak di barengi dengan ketersediaan lahan sehingga berdampak terhadap penyempitan lahan pemakaman umum, dan tingginya angka kematian yang terjadi di kota-kota besar sedangkan lahan pemakaman yang terbatas, ditambah lagi dengan adanya pemborosan lahan makam yang di sebabkan oleh praktik penguburan yang di lakukan di masyarakat. Seperti yang terjadi di beberapa kota be-

sar seperti Jakarta, Surakarta, Bogor, Sukabumi dan masih banyak daerah-daerah padat lainnya. Sehingga, untuk mengantisipasi terjadinya krisis lahan makam atau darurat lahan pemakaman itulah dimungkinkan penguburan secara berdiri.

#### B. Penguburan secara berdiri perspektif hukum Islam

Secara hukum asal, bentuk kuburan ada dua,<sup>12</sup> yaitu lahad dan syaq. Cara membuat syaq adalah menggali lubang kuburan sedalam orang yang berdiri dan mengangkat tangannya (kurang lebih 2,25 m), lalu dibuat liang di dasarnya seluas tubuh jenazah. Dalam prosesi penguburan, jenazah dibaringkan di liang tersebut di atas sisi kanan tubuhnya dengan wajah menghadap ke arah kiblat. Tubuh jenazah itu diberi penahan dan tangannya diletakkan di sisi tubuhnya. Lalu permukaan lubang itu ditutup dengan batu bata atau batu biasa. Setelah itu lubang kuburan itu ditutup dengan tanah.

Adapun cara membuat lahad adalah dengan menggali lubang kuburan sedalam dua pertiga dari tubuh orang yang berdiri, lalu dibuat liang seluas ukuran tubuh jenazah yang di salah satu sisi di dasar lubang kuburan tersebut. Lalu permukaan liang lahad itu ditutup dengan batu bata atau batu biasa. Setelah itu, lubang kuburan ditimbun dengan tanah.<sup>13</sup>

Didalam Alqur'an memang tidak di sebutkan secara langsung adanya kewajiban untuk meletakkan jenazah di dalam kubur pada posisi miring menghadap kearah kiblat, sehingga para ulama fikih pun berbeda pendapat tentang hukumnya, Menurut mazhab Maliki dan Hanafi, sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Wahbah Az-Zuhayli, hukum menghadapkan jenazah ke arah kiblat di dalam liang lahad adalah sunnah. Ini berbeda dengan mazhab Hanbali yang mewajibkannya sebagaimana umumnya ulama mazhab Syafi'i. Semua itu berdasarkan sabda Rasulullah SAW:

Artinya :

*Dari Umair bin qatadah, bahwasannya nabi Muhammad SAW berkata tentang masjidil haram “(Ka’bah adalah) kiblat kalian, kalian dalam kondisi hidup dan mati,’ (HR Abu Dawud dan Al-Hakim yang mengatakan, “(Hadits ini) shahih sanadnya, ’).<sup>14</sup>*

Selain itu, praktik ini juga didasari oleh tradisi penguburan jenazah yang sudah berlangsung sejak generasi salaf hingga sekarang. Nabi Muhammad SAW

<sup>11</sup>Sugiyono, Metodologi Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, (Bandung: Alfabeta, ), h. 308.

<sup>12</sup>Mustafa Al-khan, Dkk., Al-Fiqh Al-Manhaji Ala Al-Madzhah Asy-Syafi'i,.... h. 256-257

<sup>13</sup>Mustafa Al-khan, Dkk., Al-Fiqh Al-Manhaji Ala Al-Madzhah Asy-Syafi'i,.... h. 257

<sup>14</sup>Ibnul Mulaqqin Umar bin Ali Al-Mishri, Tuhfatul Muhtaj ila Adillatil Minhaj, (Makkah: Darul Harra, 1985) cetakan pertama, tahqiq: Abdullah bin Sa'af al-Lihyani, juz I, h. 580.

<sup>15</sup>Wahbah Az-Zuhayli, Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh,.... h. 663.

<sup>16</sup>Mustafa Al-khan, Dkk., Al-Fiqh Al-Manhaji Ala Al-Madzhah Asy-Syafi'i,.... h. 256

sendiri pun dimakamkan dengan cara demikian.<sup>15</sup>

Secara teknis Musthafa Al-Khan dkk, di dalam kitabnya *Al-fiqh Al-manhaji 'Ala Mazhab As-syafi'* menyatakan bahwa kewajiban minimal dalam penguburan adalah dengan mengubur jenazah pada satu lubang yang dapat mencegah tersebarnya bau dan dari dimangsa binatang buas, serta dengan menghadapkannya ke arah kiblat.<sup>16</sup>

Wacana penguburan secara berdiri timbul di latarbelakangi oleh adanya kemungkinan penyempitan lahan yang di gunakan untuk perekonomian, tempat tinggal dan penguburan. Sehingga, untuk mengantisipasi terjadinya krisis lahan makam atau darurat lahan pemakaman itulah dimungkinkan penguburan secara berdiri.

Penguburan secara berdiri maksudnya adalah peletakkan posisi jenazah di dalam kubur yang tidak di baringkan baik itu dalam lahad maupun dalam syaq, akan tetapi karena kondisi tertentu jenazah di kuburkan dengan posisi berdiri dan menghadap ke arah kiblat. Hal ini bertujuan dalam rangka penghematan pemakaian lahan pemakaman.

Secara teknis, penguburan secara berdiri pada tahapan-tahapan proses penguburan tidak jauh berbeda dengan penguburan seperti yang biasa di lakukan, di mulai dari proses penggalian tanah yang berbentuk persegi dengan kedalaman yang di sesuaikan dengan keinginan tanpa ada batas tertentu selama jenazah tertanam di dalam tanah dengan baik dan tidak tersebar baunya sehingga tidak mencemari lingkungan sekitar serta terhindar dari gangguan binatang buas, Penggalian tanah makam bisa di lakukan dengan cara tradisional menggunakan cangkul ataupun alat-alat lainnya, namun jika di kota-kota besar alat-alat penggalian tanah sudah semakin canggih, sehingga mempermudah penggalian tanah itu dan dapat di lakukan oleh satu atau dua orang saja.

Kemudian dilanjutkan dengan memasukkan jenazah ke dalam kubur dengan posisi berdiri, atau bisa juga menggunakan peti atau sejenisnya yang dapat membuat posisi jenazah itu berdiri, atau bisa juga di letakkan dengan posisi sedikit bersandar ke dinding tanah sehingga tubuh jenazah dapat berdiri, atau bisa juga di buatkan semacam lubang galian tambahan yang menyerupai lahad seukuran tubuh jenazah, akan tetapi letaknya di dinding kubur, kemudian di tambahkan juga papan atau yang sejenisnya sebagai penopang atau penyanggah tubuh jenazah itu, atau bisa juga menggunakan teknik-teknik lainnya yang mendukung prosesi penguburan ini, lalu jenazah di

hadapkan ke arah kiblat. Sehingga posisi jenazah tegak berdiri menghadap kiblat layaknya seperti berdirinya orang yang sholat.

Penguburan jenazah dengan posisi berdiri hanya membutuhkan tanah satu petak makam yang berbentuk persegi dengan total lahan yang di gunakan 2,5 meter persegi dapat menghemat penggunaan lahan pemakaman. Rinciannya, 1,5 meter x 1,5 meter (2,25 meter persegi) untuk satu petak makam termasuk di dalamnya jarak antar makam dan sisanya untuk sarana prasarana seperti jalan di sebelahnya. Jika dalam sehari di kota Jakarta ada 100 jenazah yang disemayamkan, maka total lahan yang di gunakan dalam setahun atau 365 hari yakni 91.250 meter persegi atau 9,125 hektare. Sehingga kapasitas lahan Tempat Pemakaman Umum dapat menampung jumlah jenazah yang lebih banyak dan dapat menghemat penggunaan lahan makam di dibandingkan dengan penguburan secara biasanya yang memakai lahan dalam setahun yakni 20,075 hektare.

Di dalam Islam terdapat keringanan-keringanan bagi umatnya pada kondisi-kondisi tertentu yang membolehkan melakukan sesuatu yang di larang berdasarkan dalil-dalil berikut ini:

#### Istihsan

Menurut bahasa istihsan berarti memandang baik sesuatu. Ia juga berarti sesuatu yang di gemari dan di senangi manusia, walaupun di pandang buruk orang lain.<sup>17</sup> Kemudian arti lainnya adalah memperhitungkan sesuatu lebih baik, atau adanya sesuatu yang lebih baik, atau mengikuti sesuatu yang lebih baik, atau mencari yang lebih baik untuk diikuti, karena memang disuruh untuk itu.<sup>18</sup>

Dari beberapa arti di atas tergambar bahwa adanya seseorang yang menghadapi dua hal yang keduanya baik. Namun ada hal yang mendorongnya untuk meninggalkan satu diantaranya dan menetapkan untuk mengambil yang satunya lagi, karena itulah yang di anggapnya lebih baik untuk diamalkan. Sedangkan menurut Istilah, terdapat berbagai makna menurut para ulama:

Menurut Abdul Wahab Khalaf, istihsan ialah berpindahnya seorang mujtahid dari tuntutan qiyas jali kepada tuntutan qiyas khafi, atau dari hukum kully kepada hukum istisna'i berdasarkan dalil.<sup>19</sup>

<sup>15</sup>Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul al-Fiqh* .... h. 80

<sup>16</sup>Abdul Karim Zaidan, *Al-wajiz fi Ushul al-Fiqh*..., h. 230

<sup>17</sup>Wahbah al-Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islamy*..., h. 327

<sup>18</sup>Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*..., h. 325

<sup>19</sup>Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh I* (Jakarta: Logos, 1997), h. 112.

<sup>20</sup>Suwarjin, *Ushul Fiqh*, (Yogyakarta: Teras, 2012), h. 132

<sup>21</sup>Suwarjin, *Ushul Fiqh*..., h. 132.

<sup>22</sup>Muhammad Abu Zahrah, *Ushul al-Fiqh*, (tanpa tempat: Dar al-Fikr al-Arabi, 1958), h. 262.

<sup>23</sup>Iskandar Usman, *Istihsan dan pembaharuan Hukum Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994), h. 26-27

<sup>24</sup>Suwarjin, *Ushul Fiqh*..., h. 132.

<sup>25</sup>Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh I*..., h. 110.

<sup>17</sup>Abdul Karim Zaidan, *Al-Wajiz fi Ushul al-fiqh* (Beirut: Muassasah al-Risalah, 1996), h. 230

<sup>18</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009) , h. 324

Menurut al-Bazdawi, istihsan ialah berpindah dari tuntutan qiyas kepada qiyas lain yang lebih kuat atau mentakhsis qiyas dengan dalil yang lebih kuat.<sup>20</sup>

Imam Malik mendefinisikan istihsan adalah beralih dengan salah satu dari dua dalil yang paling kuat, atau

Mengambil mas'alah juz'iyah ketika berhadapan dengan dalil kully.<sup>21</sup>

Ibnu Subki mengajukan dua rumusan tentang arti istihsan, pertama, istihsan berarti beralih dari penggunaan suatu qiyas kepada qiyas lain yang lebih kuat daripadanya (qiyas pertama). Kedua, istihsan yaitu beralih dari penggunaan sebuah dalil kepada adat kebiasaan karena suatu kemaslahatan.<sup>22</sup>

Istihsan merupakan dalil yang diperselisihkan di antara para ulama. Menurut ulama Hanafiyah, Malikiyah dan sebagian Hanabilah, istihsan merupakan dalil yang kuat dalam menetapkan hukum syara'. Mereka memperkuat penggunaan istihsan dengan dalil-dalil, baik dari Alqur'an, Sunnah maupun hasil penelitian terhadap nash.<sup>23</sup> Namun mereka berbeda-beda dalam penempatan istihsan dalam hirarki sumber/ dalil hukum Islam dan intensitas penggunaannya.<sup>24</sup>

Ulama yang terkenal banyak menggunakan istihsan diantaranya adalah Imam Abu Hanifah dan Imam Malik.<sup>25</sup> Bahkan Imam Malik pernah mengatakan bahwa istihsan adalah sembilan persepuluhnya ilmu.<sup>26</sup> Namun demikian, mereka berbeda dalam membagi istihsan. Ulama Malikiyah membagi istihsan menjadi empat, yaitu istihsan dengan 'urf, istihsan dengan maslahat, istihsan dengan ijma' dan istihsan dengan kaidah raf' al-haraj wa al-masyaqqat.<sup>27</sup> Sedangkan istihsan dengan qiyas khafy tidak dikenal dalam Ushul Fiqh Maliki. Adapun Imam Hanafi membagi istihsan kepada istihsan dengan nash, istihsan dengan ijma', istihsan dengan darurat dan istihsan dengan qiyas khafy, walaupun dalam perkembangannya ulama' Hanafiyah juga menggunakan istihsan dengan maslahat dan urf.<sup>28</sup>

Sedangkan Ulama yang menolak istihsan sebagai dalil diantaranya yaitu Ulama Syafi'iyah, Zahiriyah, Syiah dan Mu'tazilah.<sup>29</sup>

### Macam-macam Istihsan

Berdasarkan proses perpindahannya, istihsan terbagi dua,<sup>30</sup> yaitu:

Mendahulukan qiyas khafi dari qiyas jali karena ada alasan yang dibenarkan syara'. Misalnya, jika penjual dan pembeli berselisih tentang harga sebelum serah terima barang dilakukan, berdasarkan istihsan

mereka berdua dapat di sumpah, padahal menurut qiyas, penjual tidak disumpah akan tetapi menghardikan barang bukti.

Mengecualikan hukum juz'i dari hukum kully dengan dalil. Seperti, menurut hukum kully jual beli barang yang ma'dum itu dilarang karena mengandung unsur gharar, tetapi berdasarkan istihsan dapat dilakukan melalui jual beli akad salam.

Sedangkan berdasarkan sandarannya, istihsan dibagi menjadi enam,<sup>31</sup> yaitu:

Istihsan berdasarkan nash, yaitu adanya ayat atau hadis tentang hukum sesuatu yang berbeda dengan ketentuan kaedah umum.

Istihsan bi al-Ijma' yaitu meninggalkan qiyas dalam suatu masalah berdasarkan ijma' yang menetapkan hukum berbeda dengan hukum yang ditunjuk qiyas. Seperti sahnya akad istishna' berdasarkan ijma; ulama'. Padahal menurut qiyas itu tidak sah, sebab obyek yang di akadkan belum ada (ma'dum) pada saat akad dilangsungkan.

Istihsan berdasarkan qiyas khafi. Misalnya menurut Hanafiyah jika penjual dan pembeli berselisih tentang harga barang sebelum serah terima dilakukan, menurut qiyas penjual harus mendatangkan bukti dan pembeli di sumpah. Namun menurut istihsan keduanya dapat di sumpah.<sup>32</sup>

Istihsan bi al-Maslaha. Seperti ketentuan umum menetapkan bahwa buruh di suatu pabrik tidak bertanggung jawab atas kerusakan hasil komoditi yang diproduksi oleh pabrik itu, kecuali atas kelalaian dan kesengajaan mereka, karena status mereka hanya buruh yang menerima upah. Akan tetapi demi kemaslahatan dalam memelihara harta orang lain dari sikap tidak bertanggung jawab dan sulitnya mempercayai sebagian pekerja pabrik dalam masalah keamanan produksi, maka ulama Hanafiyah menggunakan istihsan yang menyatakan bahwa buruh harus bertanggung jawab atas kerusakan produksi baik di sengaja atau tidak.<sup>33</sup>

Istihsan bi al-'Adah au al-Urf, yaitu istihsan berdasarkan kebiasaan yang berlaku umum. Misalnya sewa pemandian dengan harga tertentu tanpa pembatasan air yang digunakan serta lamanya waktu pemakaian. Menurut qiyas hal ini tidak di bolehkan, sebab obyek akad ijarah itu harus jelas sehingga tidak menimbulkan perselisihan. Namun menurut istihsan hal itu di perbolehkan lantaran kebiasaan yang berlaku di dalam masyarakat tidak menuntut jumlah air

<sup>20</sup>Yahya Ibnu Syarfi an-Nawawi, Riyadhusshalihin...h. 256

<sup>21</sup>Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah jilid 1, (Kairo: Dar al-Fath, 1999), h. 457.

<sup>22</sup>Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah jilid 1..., h. 458.

<sup>23</sup>Q.S Surah al-Isra/17: 70, Surah al-Mursalat/77: 25-26 dan Surah Abasa/80: 21

<sup>24</sup>Ibnul Mulaqqin Umar bin Ali Al-Mishri, Tuhfatul Muhtaj ila Adillatil Minhaj, (Makkah: Darul Harra, 1985) cetakan pertama, tahqiq: Abdullah bin Sa'af al-Lihyani, juz I, h. 580.

<sup>25</sup>efriantosusanto@gmail.com, Bengkulu Kota, provinsi Bengkulu.

<sup>26</sup>Pembimbing I

<sup>27</sup>Pembimbing II

<sup>28</sup>Q.S. Surah al-Jumu'ah/62: 8

<sup>29</sup>Yahya Ibnu Syarfi an-Nawawi, Riyadhusshalihin min kalamain sayyidil mursalin, (Kairo: Maktabah as-Saffah, 2004), h. 255



yang digunakan dan berapa lama waktu yang di habiskan.<sup>34</sup>

Istihsan bi al-Darurah. Yaitu ada keadaan-keadaan darurat yang menyebabkan seorang mujtahid tidak memakai kaedah umum atau qiyas. Misalnya dalam masalah sumur yang kemasukan najis, menurut kaedah umum sumur itu tidak mungkin di sucikan dengan air tersebut dari sumur karena sisa air yang bersumber darinya tetaplah najis. Hanya saja berdasarkan istihsan sumur tersebut di humu suci dengan mengeluarkan air yang ada dalam jumlah tertentu karena alasan darurat.

## 2. Kaedah fihiyyah Ad-Dharurat Tubihu al-Mahzhurat (darurat itu membolehkan larangan)

Dharurat artinya adalah kebutuhan yang sangat mendesak/genting, sedangkan al-Mahzhurat yaitu sesuatu yang haram dan tidak boleh di kerjakan.<sup>35</sup>

Darurat juga bermakna suatu keadaan yang menyelimuti manusia dalam situasi dan kondisi yang tidak baik yang mana mendorongnya melakukan hal yang diharamkan dan dilarang dalam Syara' guna memelihara jiwanya dari kebinasaan atau memelihara agar jangan musnah atau untuk menghindari hal yang menyakitkan baik itu secara yakin atau diduga demikian.<sup>36</sup>

Keadaan darurat adalah suatu keadaan dimana nyawanya, agamanya, atau hartanya bisa terancam. Apabila seseorang mengalami keadaan seperti ini maka diperbolehkan baginya untuk mengambil keharaman tersebut sekadar kebutuhannya (sebagaimana kaidah berikutnya). Allah berfirman dalam Surah Al-Baqarah/2 : 173 berikut:

Artinya :

*"Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang (ketika disembelih) disebut (nama) selain Allah. Tetapi barangsiapa dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang."*<sup>36</sup>

<sup>34</sup>Sugiyono, Metodologi Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, (Bandung: Alfabeta, ), h. 308.

<sup>35</sup>Mustafa Al-khan, Dkk., Al-Fiqh Al-Manhaji Ala Al-Madzhah Asy-Syafi'i,.... h. 256-257

<sup>36</sup>Mustafa Al-khan, Dkk., Al-Fiqh Al-Manhaji Ala Al-Madzhah Asy-Syafi'i,.... h. 257

<sup>40</sup>Ibnul Mulaqqin Umar bin Ali Al-Mishri, Tuhfatul Muhtaj ila Adillatil Minhaj, (Makkah: Darul Harra, 1985) cetakan pertama, tahqiq: Abdullah bin Sa'af al-Lihyani, juz I, h. 580.

<sup>45</sup>Wahbah Az-Zuhayli, Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh,.... h. 663.

<sup>46</sup>Mustafa Al-khan, Dkk., Al-Fiqh Al-Manhaji Ala Al-Madzhah Asy-Syafi'i,.... h. 256

<sup>47</sup>Abdul Karim Zaidan, Al-Wajiz fi Ushul al-fiqh (Beirut: Muassasah al-Risalah, 1996), h. 230

<sup>48</sup>Amir Syarifuddin, Ushul Fiqh (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009) , h. 324

Allah juga berfirman dalam surah Al-maidah/5: 3 berikut ini:

Artinya :

*"Maka barang siapa terpaksa karena kelaparan tanpa sengaja berbuat dosa, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang."*<sup>37</sup>

Sebagai contoh, seseorang yang tersesat di tengah hutan tanpa bekal makanan atau kehabisan bekal makanan. Agar dia tetap bertahan hidup, dia harus tetap makan makanan, namun yang dijumpai hanya babi dan tidak menjumpai makanan halal lainnya.

Maka pada saat itu diperbolehkan baginya makan daging babi tersebut sekadar kebutuhannya.<sup>38</sup>

## 3. Teori Perubahan Hukum

Teori adaptabilitas (penyesuaian), menjelaskan bahwa hukum Islam bisa disesuaikan dengan perubahan sosial dan membutuhkan ijtihad-ijtihad baru yang disesuaikan dengan realitas sosial dan bisa merespon perubahan sosial. Perlu di ketahui bahwa adaptabilitas bisa mengacu kepada dua frame, yaitu kemungkinan perluasan hukum yang sudah ada dan keterbukaan satu kumpulan hukum bagi perubahan.<sup>38</sup>

Menurut Ibnu Qayyim al-Jauziyah, seperti yang dikutip oleh Zulham Wahyudani, bahwa perubahan hukum terjadi karena perubahan fatwa, sedangkan perubahan fatwa terjadi karena adanya perubahan aspek-aspek yang mengitari hukum itu.<sup>39</sup>

Dalam Kitabnya l'lam al-Muwaqqi'in, al-Jauziyah mengatakan :

*"Perubahan fatwa dan perbedaan hukum tentangnya disebabkan oleh faktor zaman, tempat, situasi, niat dan faktor adat".*

Maksudnya adalah bahwa kondisi atau keadaan suatu masyarakat akan mempengaruhi hukum yang dikeluarkan seorang Mufti. Namun hal ini tidak berarti bahwa hukum akan berubah begitu saja tanpa memperhatikan norma yang terdapat di dalam sumber utama hukum Islam yaitu Qur'an dan Hadis.

Pada prinsipnya, pandangan al-Jauziyah ini mengacu kepada hakikat syariat islam yang senantiasa berorientasi kepada kemaslahatan manusia. Syariat di hadirkan melalui Rasulullah bertujuan untuk mewujudkan keadilan hukum, kemaslahatan, dan kebajikan. Oleh karena itu setiap ketentuan atau aturan hukum yang tidak memenuhi asas keadilan dipandang

<sup>40</sup>Abdul Wahab Khalaf, Ilmu Ushul al-Fiqh ,... h. 80

<sup>50</sup>Abdul Karim Zaidan, Al-wajiz fi Ushul al-Fiqh..., h. 230

<sup>51</sup>Wahbah al-Zuhaili, Ushul al-Fiqh al-Islami,.... h. 327

<sup>52</sup>Amir Syarifuddin, Ushul Fiqh..., h. 325

<sup>53</sup>Nasrun Haroen, Ushul Fiqh I (Jakarta: Logos, 1997), h. 112.

<sup>54</sup>Suwarjin, Ushul Fiqh, (Yogyakarta: Teras, 2012), h. 132

<sup>55</sup>Suwarjin, Ushul Fiqh..., h. 132.

<sup>56</sup>Muhammad Abu Zahrah, Ushul al-Fiqh, (tanpa tempat: Dar al-Fikr al-Arabi, 1958), h. 262.

bertentangan dengan syariat Islam.

Tujuan hukum Islam adalah kemaslahatan. Kemaslahatan sebagai substansi syariat mengalami perbedaan seiring dengan perbedaan zaman, tempat, situasi, niat dan adat. Artinya bahwa perbedaan zaman, tempat, situasi, niat dan adat menjadi legitimasi dan alasan bagi terjadinya perubahan hukum. Pandangan al-Jauziyah menunjukkan bahwa syariat Islam bersifat fleksibel dan adaptif dalam merespon setiap perubahan dan perkembangan. Dengan kata lain bahwa al-Jauziyah berpendapat sesungguhnya hukum Islam dapat di tafsirkan dan di terjemahkan sesuai konteks sosial umat.

Hukum Islam bisa disesuaikan dengan perubahan sosial dan membutuhkan ijtihad-ijtihad baru yang sesuai dengan realitas sosial dan bisa merespon perubahan sosial. Maka para Mujtahid pun bisa merubah hukum karena pertimbangan tempat dan waktu. Seperti apa yang dilakukan oleh Imam Syafi'i yang mempunyai qaul jadid (pendapat baru) ketika ia berada di Mesir dan qaul qadim (pendapat lama) ketika ia berada di Baghdad. Puluhan bahkan ribuan pendapat Imam Syafi'i diubah dan diganti dengan pendapat baru sesuai dengan lingkungan sosial barunya itu.

Dalam hal ini, fikih di tuntut untuk mampu merespon berbagai perubahan sosial yang tidak bisa mengabaikan fakta-fakta empiris-historis yang senantiasa berubah di masyarakat. Karena fikih yang mengabaikan realitas adalah fikih yang "kering" dan juga fikih yang tidak memiliki akar di dalam masyarakat.

Menurut Atho' Mudzhar, sebagaimana dikutip oleh Jazuli Amrullah, hukum Islam (fikih) dituntut mampu beradaptasi dengan sistem hukum yang berlaku dimanapun. Oleh karena fikih harus ditransformasikan menjadi nilai-nilai sosial dan diterima di tengah kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara.

#### 4. Kaedah fiqhiyyah Ad-Dhararu Yuzalu (Kemudharatan dihilangkan)

Dasar Qaidah ini dari Al-Qur'an adalah sebagai berikut:

Qur'an surah al-Baqarah ayat 60:

*"...dan janganlah kamu berkeliaran di muka bumi dengan berbuat kerusakan."*

Qur'an surah al-A'raf ayat 56:

<sup>57</sup>Iskandar Usman, Istihsan dan pembaharuan Hukum Islam, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994), h. 26-27

<sup>58</sup>Suwarjin, Ushul Fiqh..., h. 132.

<sup>59</sup>Nasrun Haroen, Ushul Fiqh I..., h. 110.

<sup>60</sup>Suwarjin, Ushul Fiqh..., h. 134.

<sup>61</sup>Abdul Karim Zaidan, Al-wajiz fi Ushul al-Fiqh..., h. 233.

<sup>62</sup>Abdul Wahab Khalaf, Ilmu Ushul al-Fiqh..., h. 80.

<sup>63</sup>Nasrun Haroen, Ushul Fiqh I..., h. 107

*"Dan janganlah kamu membuat kerusakan di bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya..."*

Qur'an surah al-Qashash ayat 77:

*"...dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan."*

Al-Qur'an surah al-Baqarah ayat 231:

*"Janganlah kamu rujuki mereka untuk memberi kemudharatan, karena dengan demikian kamu menganiaya mereka. Barangsiapa berbuat demikian, maka sungguh ia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri."*

Kemudian hadis Rasulullah SAW. riwayat dari Ahmad bin Hanbal dari Ibnu Abbas:

*"Tidak boleh membahayakan dan tidak boleh (pula) saling membahayakan (merugikan)"*

Para ulama menganggap hadis di atas sebagai jawami' al-kalim, kemudian hadis tersebut dijadikan sebagai qaidah fiqhiyyah asasiyyah. Di dalam hadis ini pula menjelaskan bahwa perintah untuk menghilangkan dharar adalah mutlaq dan harus dilaksanakan, baik dharar terhadap diri sendiri maupun orang lain, kecuali hudud dan hukuman-hukuman yang di kecualikan dengan nash.<sup>37</sup>

Mudharat secara etimologi adalah berasal dari kalimat "al-Dharar" yang berarti sesuatu yang turun tanpa ada yang dapat menahannya. Al-dharar adalah membahayakan orang lain secara mutlak, sedangkan al-dhirar adalah membahayakan orang lain dengan cara yang tidak disyariatkan.

Jadi, penguburan secara berdiri boleh dilakukan jika kondisi lahan pemakaman sudah dalam keadaan sulit dan darurat yang dapat memberikan dampak yang buruk bagi diri dan lingkungan. Dan ini merupakan salah satu solusinya. Akan tetapi, jika tanah pemakaman masih luas dan tidak dalam kondisi yang

<sup>64</sup>Wahbah al-Zuhaili, Ushul al-Fiqh al-Islamy II..., h. 26

<sup>65</sup>Abdul Aziz Azzam, Al-muhadharat An-nadiyah fil qowai'idil fiqhiyyah..., h. 133

<sup>66</sup>Wahbah Zuhaili, Nazhariyah al-Dharurat al-Syar'iyah, Muqaranah Ma'a al-Qanun al-Wadh'iyyah..., h. 247

<sup>67</sup>(QS Al-Baqarah : 173)

<sup>68</sup>(QS Al-Maidah : 3)

<sup>69</sup>Abdul Aziz Azzam, Al-muhadharat An-nadiyah fil qowai'idil fiqhiyyah..., h. 123-124

<sup>70</sup>Muhammad khalid Mas'ud, Filsafat Hukum Islam; Studi tentang Hidup dan Pemikiran Al-Syatibi, terj. Ahsin Muhammad, Cet I (Bandung: Pustaka, 1996) h. 1

<sup>71</sup>Zulham Wahyudani "Perubahan Sosial dan Kaitannya dengan Pembagian Harta Warisan dalam perspektif Hukum Islam" Jurnal Ilmiah Islam Futura, Vol: 14 Nomor 02, Februari 2015.

<sup>72</sup>Ahmad bin Hanbal, al-Musnad, (T.tp.: Muassasah al-Risalah, 1999), h. 438

<sup>73</sup>Abdul Aziz Azzam, Al-muhadharat An-nadiyah fil qowai'idil fiqhiyyah..., h. 128

<sup>74</sup>[HR. Muslim, no. 94/970].

darurat seperti di desa-desa, maka pemakaman wajib mengikuti tatacara penguburan yang normal berdasarkan petunjuk dan dalil yang sudah ada.

Walaupun demikian, permasalahan penyempitan lahan pemakaman dapat juga di atasi dengan cara tidak menembok kuburan karena sunnahnya adalah cukup dengan memberikan tanda diatas kuburan pada bagian kepala dan kaki sehingga kapasitas lahanpun dapat menampung pemakaman yang lebih banyak. Sebab menembok kuburan pada hakikatnya merupakan perbuatan yang tidak di bolehkan berdasarkan hadis Rasulullah Saw yang diriwayatkan dari Jabir ra :

Artinya :

*“Diriwayatkan dari Jabir, ia berkata: Rasulullah saw melarang memplester kubur, mendudukinya dan mendirikan bangunan di atasnya.”*<sup>38</sup>

### Kesimpulan

Penyebab adanya wacana penguburan secara berdiri adalah Perkembangan penduduk, dan tingkat kematian yang tinggi yang tidak di barengi dengan ketersediaan lahan pemakaman serta prosesi pemakaman yang biasa dilakukan membuat tanah makam semakin hari semakin menipis.

Penguburan secara berdiri boleh dilakukan bila kondisi pemakaman tersebut sudah dalam keadaan sulit dan darurat, berdasarkan dalil istihsan bidharurah, kaedah fiqhiyyah Ad-Dhararu Yuzalu (Kemudharatan dihilangkan) dan kaedah fiqhiyyah Ad-Dharurat Tubihu al-Mahzhurat (darurat itu membolehkan larangan).

### Daftar Pustaka

- Abdul Karim Zaidan, Al-Wajiz fi Ushul al-fiqh. Beirut: Muassasah al-Risalah, 1996.
- Amir Syarifuddin, Ushul Fiqh. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009.
- Ibnul Mulaqqin Umar bin Ali Al-Mishri, Tuhfatul Muhtaj ila Adillatil Minhaj, Makkah: Darul Harra, 1985.
- Iskandar Usman, Istihsan dan pembaharuan Hukum Islam, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994.
- Mustafa Al-khan, Dkk., Al-Fiqh Al-Manhaji Ala Al-Madzhah Asy-Syafi'i, Damaskus: Darul Qolam, 1992.
- Nasrun Haroen, Ushul Fiqh I. Jakarta: Logos, 1997.
- Muhammad Abu Zahrah, Ushul al-Fiqh, (tanpa tempat: Dar al-Fikr al-Arabi, 1958.
- Muhammad khalid Mas'ud, Filsafat Hukum Islam; Studi tentang Hidup dan Pemikiran Al-Syatibi, terj. Ahsin Muhammad, Cet I. Bandung: Pustaka, 1996.
- Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah jilid 1, Kairo: Dar al-Fath, 1999.
- Sugiyono, Metodologi Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, Bandung: Alfabeta, 2012.
- Suwarjin, Ushul Fiqh, Yogyakarta: Teras, 2012.
- Yahya Ibnu Syarf an-Nawawi, Riyadhushshalihin min kalamain sayyidil mursalin, Kairo: Maktabah as-Safah, 2004.
- Zulham Wahyudani “Perubahan Sosial dan Kaitannya dengan Pembagian Harta Warisan dalam perspektif Hukum Islam” Jurnal Ilmiah Islam Futura, Vol: 14 Nomor 02, Februari 2015.